

343.0999 Pen t  
Computer Law

R. FH  
Hd. 6-2-04  
17873

LAPORAN PENELITIAN

**Tinjauan Yuridis Penggunaan Program Komputer Yang  
Tidak Asli Untuk Kepentingan Sendiri Ditinjau Dari Undang-  
Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002.**




Oleh:

**TH. Anita Christiani, SH, M. Hum.  
Maria Hutapea, SH**

**Dosen Fakultas Hukum UAJY**



**DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH DANA DARI LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2003/2004**

 <b>MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA</b>	
Ditarima	: 10 FEB 2004
Inventarisasi	: 082/FH/Hd.02 Pen /04
Klasifikasi	Rif 343.0999 Pen t
Selesai Diproses	: 17 FEB 2004

## IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

- 1.a. Judul : **Tinjauan Yuridis Penggunaan Program Komputer Yang Tidak Asli Untuk Kepentingan Sendiri Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002.**
- b. Macam Penelitian : Terapan
- c. Kategori penelitian : II
2. Kepala Proyek Penelitian :
- a. Nama : Th.Anita Christiani, S.H, M.Hum.
- b. Jenis kelamin : perempuan
- c. Pangkat/golongan : IIIc
- d. Jabatan fungsional : Lektor
- e. Fakultas : Hukum
- f. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- g. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
3. Jumlah anggota pelaksana : 1 orang
4. Jangka waktu penelitian : 5 bulan
5. Biaya yang diperlukan : Rp.3.000.000,-

Yogyakarta, Januari 2004

Anggota

Maria Hutapea, SH

Mengetahui,  
Dekan Fak.Hukum:

  
(J. Widjantoro, S.H, M.H)  
FAKULTAS HUKUM

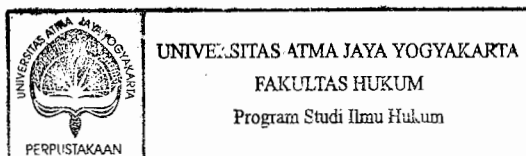
Ketua Tim Peneliti

Th.Anita Christiani, SH, M.Hum.



Menyetujui,  
Kepala LPU: 03 FEB 2004  
  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS  
(Ch. En Utami Mediastika, ST, Ph.D)

(i)



## DAFTAR ISI

Halaman pengesahan.....	(i)
Daftar isi.....	(ii)
Bab I PENDAHULUAN	
1. Latar belakang masalah.....	1
2. Permasalahan.....	3
3. Tujuan penelitian.....	3
4. Metode penelitian.....	4
Bab II PEMBAHASAN	
I. Tinjauan Umum Tentang Hak	6
A. Paten.....	9
B. Rahasia dagang.....	12
C. Disain industri.....	13
D. Desain tata letak sirkuit terpadu.....	14
E. Merek .....	15
F. Hak Cipta.....	29
1. Pengertian Hak Cipta dan pencipta.....	29
2. Ciptaan yang dilindungi.....	30
3. Pembatasan hak cipta .....	31
4. Bentuk-Bentuk pelanggaran Hak cipta.....	33
II. Tinjauan Yuridis penggunaan Program Komputer Yang Tidak Asli Untuk Kepentingan Sendiri Dalam KUHPidana.....	38
Bab III Penutup	
Daftar pustaka	

## I. Latar belakang masalah.

Sebagai konsekuensi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan Dunia (WTO) dan sebagai salah satu negara penandatangan perjanjian yang tertuang dalam GATT maka Indonesia harus menyesuaikan berbagai peraturan perundangan yang ada. Didalam GATT sendiri terdapat bagian yang mengatur secara khusus mengenai HaKI yaitu TRIPS atau Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Dengan keikutsertaan Indonesia tersebut, disamping menikmati hak, Indonesia juga harus menunaikan kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut adalah melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung didalam TRIPS termasuk yang berkenaan dengan penegakan hukum (Achmad Zen Umar Purba, 2003,1).

Pembentukan Undang-Undang di bidang HaKI merupakan salah satu upaya untuk membangun satu sistem hukum HAKI Indonesia yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sistem perdagangan global yang berlandaskan pada prinsip perdagangan bebas. Pembentukan peraturan perundangan di bidang HAKI memberikan perlindungan hukum bagi setiap produk karya-karya intelektual yang diciptakan bangsa kita sendiri.

Saat ini Indonesia sudah mempunyai peraturan perundangan di bidang HAKI yang cukup lengkap antara lain Undang-undang tentang hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang dan undang-undang mengenai desain tata letak terpadu. Undang-undang Merek yang sekarang ada adalah UU NO 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kemudian UU Paten yang sekarang berlaku mulai 1 Agustus 2001 yaitu UU nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten, undang-undang ini

. Pada tahun 2000 juga sudah diundangkan UU tentang Rahasia Dagang yaitu UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang , kemudian UU nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu . Ketiga undang-Undang ini disahkan secara bersama-sama pada tanggal 22 Desember Tahun 2000. Pengaturan yang baru yang berkaitan dengan Haki yaitu Undang –Undang Hak Cipta No 19 tahun 2002 yang menggantikan UU no 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan UU No 12 tahun 1997 . UU Hak cipta yang baru tersebut mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2003.

Undang-Undang No 19 tahun 2002 tersebut ditetapkan dengan antara lain dengan pertimbangan bahwa pertama Indonesia memiliki keaneka ragaman suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual (Emawati Junus,2003,2) . Kedua Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi dan perjanjian di bidang hak atas kekayaan Intelektual dengan konsekwensi melakukan penyesuaian ketentuan hukum nasional kita terhadap ketentuan HAKI yang diratifikasi.Ketiga perkembangan di bidang perdagangan dan industri , serta investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dengan pertimbangan –pertimbangan tersebut maka UU Hak Cipta yang baru perlu ditetapkan.

Berkaitan dengan Berlakunya UU Hak cipta tersebut , program komputer merupakan sesuatu hal yang erat kaitannya dengan obyek yang diberikan

perlindungan oleh hak cipta . Program komputer merupakan suatu karya intelektual yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Undang –Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat beberapa ketentuan baru yang berkaitan dengan penggunaan program komputer. Salah satu ketentuan yang baru yaitu adanya ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa yang termasuk bentuk pelanggaran hak cipta khususnya program komputer adalah perbanyakan penggunaan program komputer dan kemudian perbanyakan tersebut digunakan untuk kepentingan komersial. Didalam prakteknya terdapat banyak penggunaan program komputer yang tidak asli didalam masyarakat dan tidak bersifat komersial terbatas untuk kepentingan diri sendiri. Dilain pihak hal tersebut tetap merugikan kepentingan ekonomi dari pencipta.

## **II. Permasalahan**

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah penggunaan program komputer yang tidak asli untuk kepentingan sendiri termasuk bentuk pelanggaran Hak cipta?

## **III. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan program komputer yang tidak asli merupakan suatu bentuk pelanggaran.

## **IV. Metode Penelitian**

### **IV.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-perundangan dan buku-buku atau literature yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

### **V.2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan-perundangan, buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dibedakan menjadi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan-perundangan yang berkaitan dengan bidang HAKI UU Nomor 19 Tahun 2002.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan keterangan serta penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus-kamus hukum.

#### **IV.3 . Metode pengumpulan data**

Sarana untuk mengumpulkan data yaitu melalui studi pustaka atau dokumen. Pengumpulan data melalui studi pustaka adalah cara mengumpulkan data dengan tidak secara langsung pada responden tetapi melalui data-data tertulis yang mendukung permasalahan yang diteliti.

#### **IV.4. Metode analisis data**

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu metode berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **II.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.**

Sebagai konsekwensi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan Dunia (WTO) dan sebagai salah satu negara penandatangan perjanjian yang tertuang dalam GATT maka Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundangan khususnya di bidang HAKI . Pembentukan Undang-Undang di bidang HaKI tersebut dan peraturan pelaksanaannya merupakan suatu upaya untuk membangun satu sistem hukum HAKI Indonesia yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sistem perdagangan global yang berlandaskan pada prinsip perdagangan bebas.

Pembentukan peraturan perundangan di bidang HAKI tersebut merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap produk karya-karya intelektual yang diciptakan bangsa kita sendiri .

Saat ini Indonesia sudah mempunyai peraturan perundangan di bidang Haki yang cukup lengkap antara lain Undang-undang Hak Cipta yaitu UU No 19 tahun 2002, Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 6 Tahun 1982 yang telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 dan UU Nomor 12 tahun 1997, Undang-undang Merek yang sekarang ada adalah UU NO 15 Tahun 2001 tentang Merek , Undang-undang ini menggantikan Nomor 19 tahun 1992 yang telah

diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 1997,. Kemudian UU Paten yang sekarang berlaku mulai 1 Agustus 2001 yaitu UU nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten, undang-undang ini menggantikan UU Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten. Pada tahun 2000 juga sudah diundangkan UU tentang Rahasia Dagang yaitu UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang , kemudian UU nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak sirkuit Terpadu . Ketiga undang-Undang ini disahkan secara bersama-sama pada tanggal 22 Desember Tahun 2000.

Masing-masing peraturan perundangan di bidang HAKI tersebut mempunyai obyek pengaturan yang berbeda-beda .

Obyek pengaturan di bidang hak cipta adalah karya intelektual di bidang seni, sastra, Ilmu pengetahuan dan program komputer. Di bidang seni misalnya memnciptakan sebuah lagu. Di bidang sastra misalnya membuat puisi atau prosa, Di bidang Ilmu pengetahuan misalnya membuat suatu tulisan atau sebuah buku dan program-program komputer yang dilahirkan dari karya intelektual manusia.

Obyek pengaturan dibidang merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinaasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dalam Merek dibedakan antara merek barang dan merek jasa.

Obyek pengaturan paten adalah hasil invensi di bidang teknologi. Sedangkan paten sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga untuk melaksanakannya.

Obyek pengaturan tentang rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Sedangkan rahasia kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.

Obyek pengaturan desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu desain yang dapat diproduksi secara massal jadi syarat dari produk tersebut harus diproduksi secara massal.

Selanjutnya Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Selanjutnya akan diuraikan secara detail mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut sebagai berikut:

## A. Paten

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sekarang ini yang mengatur tentang paten adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Obyek pengaturan paten adalah invensi dibidang teknologi. Invensi dalam hal ini adalah ide yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi baik berupa produk ataupun proses atau penyempurnaan dan pengembangan suatu produk atau proses .

Invensi dapat di paatenkan harus mempunyai syarat-syarat yaitu :

1. New/Novel (pasal 3 ayat 1)

New atau novel ini berarti bahwa invensi tersebut belum pernah diumumkan dan didemonstrasikan di Indonesia atau diluar Indonesia. Bila invensi tersebut sudah pernah didemontrasikan maka tidak dianggap memenuhi syarat kebaruan ini.

2. Inventive step (pasal 2 ayat 2)

Ukuran dari inventive step ini yaitu bahwa penemuan ini dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya .

3. Industrial applicable (pasal 5)

Hal ini berarti bahwa peneuamn tersebut nantinya dapat diterapkan dalam industri.

Tidak semua invensi dapat dipatenkan , ada beberapa hal yang bukan dianggap sebagai invensi antara lain:

1. Telah dikenal atau digunakan
2. Telah digambarkan dalam paten, publikasi cetak

3. Telah digunakan secara umum dijual lebih dari satu tahun sebelum diajukan paten
4. Telah digambarkan dalam paten/publikasi cetak lebih dari satu tahun sebelum diajukan paten.

Didalam paten dikenal dengan nama paten sederhana yaitu invensi yang berupa produk atau alat baru dan mempunyai nilai guna praktis yang disebabkan oleh bentuk konfigurasi dan komponennya.

Jangka waktu perlindungan paten adalah untuk paten sepanjang 20 tahun dan untuk paten sederhana sepanjang 10 tahun.

Subyek paten adalah inventor dan orang yang menerima peralihan. Di dalam paten juga dikenal penemu terdahulu yaitu subyek yang melaksanakan invensi bersamaan dengan dimohonkan paten oleh pihak lain. Kedudukan penemu terdahulu ini tetap diakui meskipun kemudian ada paten untuk hal yang sama

Dasar pengakuan permohonan ke Dirjen Haki. Hal ini berarti bahwa hak pemegang paten akan diakui jika penemu paten tersebut mendaftarkan haknya kepada Dirjen Haki. Hal ini berarti bahwa tanpa permohonan paten tersebut maka penemu tidak akan memperoleh hak atas penggunaan paten, dalam praktek bila ada seorang penemu yang menemukan sesuatu lebih dulu tetapi tidak mendaftarkan maka bagi negara yang akan dilindungi adalah penemu yang mendaftarkan penemuannya walaupun si penemu tadi menemukan sesudah penemu yang pertama.

Isi hak dari pemegang paten adalah :

1 paten produk membuat , menggunakan, menjual, mengimpor , menyewakan, menyerahkan /menyerahkan untuk dijual / diserahkan produk yang diberi paten .

2. Paten proses menggunakan dan tindakan lain seperti telah diuraikan diatas

Adapun kewajiban dari pemegang paten yaitu :

1. Memproduksi atau menggunakan proses di Indonesia
2. Membayar biaya tahunan

Di dalam paten dikenal adanya lisensi yaitu :

1. Lisensi eksklusif

Lisensi ini mengandung arti bahwa tidak orang selain penerima lisensi, si pemilik paten juga tidak berhak lagi..

2. Lisensi tunggal

Lisensi diberikan kepada satu orang, sedangkan si pemilik paten tetap mempunyai hak untuk menggunakannya.

3. Lisensi non eksklusif.

Lisensi ini berarti bahwa pemilik paten tetap mempunyai hak dan dapat beroperasi bebas , serta bebas untuk membuat lisensi kepada pihak lain juga secara bebas.

Bentuk pelanggaran dalam paten yaitu memproduksi, mengimpor, menjual tanpa hak , sedangkan sanksi yang diberikan bagi pihak yang melakukan bentuk pelanggaran tersebut yaitu denda 100 juta dan pidana 7 tahun dan ancaman pidana denda 500.000 dan pidana 4 tahun. Bila dikaji daari peraturan tersebut maka dapat dilihat bahwa ancaman pidan ayang diberikan terlalu ringan bila dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh oleh si pelanggar .

## **B. RAHASIA DAGANG**

Pengertian dari rahasia dagang adalah informasi yang atidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna bagi kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik raahasia dagang .

Pengaturan mengenai rahadia dagang terdapat dalam UU No 30 Tahun 2000.

Unsur-unsur rahasia dagang yaitu :

1. Informasi rahasia dibidang teknologi
2. mempunyai nilai ekonomi
3. dijaga kerahasiannya

Ruang lingkup rahsssaia dagang adalah metode produksi , pengolahan, penjualan atau informasi, lain di bidang teknologi dan atau bisnis.

Perolehan hak tidak memerlukan formalitas pendaftaran karena munculnya hak hak karena Undang-Undang. Hal ini berarti bahwa pemegang rahasia dagang tidak diharuskan mendaftarkan, selama dia masih dapat menjaga kerahasiaannya maka dia diberikan hak oleh undang-undang untuk memegang hak rahasia dagangnya.

Jangka waktu perlindungan selama masih dijaga kerahasiaannya, selama dia masih dapat menjaga kerahasiaannya maka si pegang masih mendapat haknya sehingga jangka waktunya tidak ditentukan,

Kriteria perlindungan raahasia dagang yaitu dijaga akerahasiannya dibuat perjanjian tertulis tentang kewajiban merahasiakan .

Bentuk pelanggaran rahasia dagang yaitu sengaja mengungkap kerahasiaan, mengingkari kesepakatan merahasiakan. Dalam prakteknya memang antara si penemu dengan pihak yang terkait akan mengadakan suatu perjanjian supaya pihak-pihak yang terkait tidak membocorkan rahasia tersebut dengan ancaman sanksi yang ditentukan.

Sanksi yang diberikan bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran adalah dua tahun dan denda 300 juta rupiah.

Dalam rahasia dagang juga berlaku delik aduan. Hal ini berarti bahwa bila si pemilik hak tidak melakukan penuntutan terhadap kerugian yang dialami maka tidak akan dilakukan tindakan.

### **C. DISAIN INDUSTRI**

Pengertian Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Unsur-unsur dari disain industri :

1. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi
2. Tiga dimensi
3. Mengandung nilai estetika
4. Dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi



5. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk , barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan .

Cara memperoleh hak adalah dengan cara pendaftaran. Jangka waktu perlindungannya adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Hal ini berarti tanpa dimintakan pendaftaran maka penemu desain yang pertama kali tidak akan diberikan hak.

Bagi pemegang hak diberikan hak untuk melaksanakan dan melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor, menjual dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain.

#### **D.DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU**

Undang-undang yang berlaku berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu yaitu UU Nomor 32 tahun 2000

Pengertian desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik tertentu.

Didalam desain industri hal yang dilindungi adalah elemen-elemen yang ada pada sebuah semikonduktor dan menghasilkan fungsi elektronik

Syarat suatu elemen tersebut dapat diberi perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu harus orisinal dan tidak merupakan hal yang bersifat umum yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pencipta mempunyai hak untuk memakai, membuat, menjual, mengimpor dan mengedarkan, orang lain dilarang mempergunakan penemuan tersebut tanpa izin dari pencipta kecuali untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan dan non komersial dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi designer.

Yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam desain tata letak sirkuit terpadu yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang didalamnya telah diberi hak disain secara tanpa hak. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 3 tahun dan denda 300 juta rupiah.

#### **E. MEREK**

Hal-hal yang berkaitan dengan merek akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini. Merek merupakan bagian dari hak milik perindustrian yang meliputi hak merek, paten, tumbuh-tumbuhan (plant patent di Amerika Serikat), model-model barang untuk pemakaian sehari-hari, gambar-gambar dan model-model dalam bidang kerajinan, nama dagang dan pemberantasan persaingan tak jujur. (RM. Suryodiningrat, 1994:4)

Hal ini berarti bahwa hak milik perindustrian ini merupakan salah satu bidang dari hak kekayaan intelektual yang telah diuraikan sebelumnya.

Pengertian merek menurut pasal 1 Undang-Undang Merek No 15 tahun

2001 yaitu :

Merek adalah tanda yang berupa gambar , nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa

Hal ini berarti, bahwa dalam undang-undang tersebut dibedakan antara merek dagang dan merek jasa .

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Terdapat pengertian lain mengenai merek dagang yaitu:

“....a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as proprietor or registered user to use the mark , whether with or without any indication of the identity of that person...” (W.R. Cornish, 1989 , 439)

Pengertian ini memperjelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan merek dagang yang hanya dapat digunakan oleh pihak yang telah mendaftarkan mereknya.

Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Fungsi dari merek ini adalah sebagai pembeda barang dan jasa dalam dunia perdagangan. Persoalan-persoalan merek tersebut melintasi tapal batas nasional, karenanya bersifat internasional. Didalam pasaran luar negeri ini merek-

merek seringkali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “goodwill” dengan konsumen di luar negeri . Merek-merek ini adalah simbol – simbol dengan nama seorang yang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran ini.(Djoko Prakoso, 1987:6)

Oleh karena itu merek merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. dalam tata perekonomian dunia.

Dengan berlakunya Undang-Undang merek tahun 2001 terdapat perubahan-perubahan yang menonjol dibandingkan dengan undang-undang merek yang lama perubahan-perubahan tersebut antara lain menyangkut tentang proses penyelesaian permohonan , berkenaan dengan hak prioritas, ditolaknya permohonan yang berkenaan dengan kerugian pemohon .

Dalam Undang –undang ini selain diatur mengenai merek dagang dan merek jasa juga diatur mengenai indikasi geografis dan indikasi asal. Undang-undang ini juga mengatur upaya penyelesaian sengketa yang memerlukan peradilan khusus yaitu pengadilan niaga yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat di bidang merek, juga diatur suatu upaya untuk melindungi bagi pemilik merek guna mencegah kerugian yang lebih besar yang wujudnya adalah Penetapan Sementara Pengadilan . Undang-undang ini juga mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk memperluas kesempatan dalam mencari penyelesaian sengketa atas suatu merek.

Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam undang-undang Merek 2001;

## 1. Proses penyelesaian permohonan

Sebagai perbandingan dapat dilihat proses permohonan merek yang diatur dalam UU merek yang lama UU Nomor 19 tahun 1992 Jo UU Nomor 14 tahun 1997 sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke kantor merek kemudian permohonan merek tersebut diumumkan di kantor merek selama 6 bulan selama masa pengumuman tersebut dimungkinkan adanya oposisi .
2. Setelah itu kemudian kantor merek mengadakan pemeriksaan substantif . Pemeriksaan substantif yaitu pemeriksaan bahwa merk tersebut tidak bertentangan dengan pasal 5 dan pasal 6 . Pasal 5 menyebutkan tentang syarat merek yaitu bahwa permohonan merek akan diterima bila :
  1. tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
  2. mempunyai daya pembeda
  3. tidak telah menjadi milik umum
  4. merupakan keterangan dari barang.

Sedangkan pasal 6 Undang-Undang Merek antara lain mengatakan bahwa permohonan merek tidak akan diterima jika :

1. merek tersebut mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar.
2. Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal foto atau nama Badan hukum milik orang lain.
3. Merek tersebut merupakan nama bendera, lambang, simbol, nasional, internasional, copy atau stempel.

4. Merek tersebut merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi oleh hak cipta.
5. Merek tersebut juga menyerupai dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal untuk barang dan jasa sejenis atau tidak sejenis.

Bila kantor merek menganggap bahwa permintaan tersebut tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 tersebut maka permohonan merek tersebut dapat ditolak dan pemohon merek dapat mengajukan banding.

3. Bila Kantor merek menganggap permohonan merek tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 maka permohonan merek tersebut diterima dan proses selanjutnya adalah pemberian sertifikat merek kepada pemohon merek dan kemudian merek tersebut diumumkan dalam daftar umum merek.

Dalam undang-undang merek yang baru proses penyelesaian permohonan dirubah menjadi sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada direktorat Jendral dengan memenuhi syarat-syarat kelengkapan pendaftaran merek yang dicantumkan dalam pasal 7,8,9,10,11,12 UU merek 2001 .Khusus pasal 12 bagi permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan hak prioritas maka permohona tersebut tetap diproses, namun tanpa

menggunakan hak prioritas. Waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini adalah paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain .

- b. Direktorat Jendral melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, bila tidak lengkap maka pemohon diberikan waktu selama 2 bulan untuk melengkapinya. (jika tidak dilengkapi maka permohonan dianggap ditarik kembali),
- c. Jika sudah dilengkapi persyaratan administrasinya maka terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan.
- d. Permohonan dapat dirubah (hanya terhadap penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya) dan dapat ditarik kembali.
- e. Paling lama 30 hari sejak tanggal penerimaan direktorat jendral melakukan pemeriksaan substantif . Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan sebagaimana ketentuan pasal 4,5,6. Pemeriksaan tersebut dilakukan paling lama selama sembilan bulan .(pasal 18 ayat 1 dan 2)
- f. Jika hasil pemeriksaan substantif disetujui untuk didaftar maka atas persetujuan Direktur Jendral persetujuan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Bila ditolak maka pemohon atau kuasanya diberitahu dengan menyebut alasannya. Dalam waktu paling lama 30 hari pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatannya . ( pasal 20 0

g. Dalam waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jendral mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek ( pasal 21).

h. Pengumuman tersebut dilakukan selama 3 bulan. Terhadap pengumuman tersebut maka dapat diberikan sanggahan dan keberatan, bila keberatan diterima maka permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak (pasal 26). Jika keberatan ditolak maka permohonan merek tersebut dapat didaftar dan Direktorat jendral dapat memberikan sertifikat merek.

Bila dilihat proses pendaftaran merek pada UU Merek yang baru yang telah diuraikan tersebut akan berebda dengan pendaftaran merek pada UU merek yang lama . Pada UU Merek lama pemeriksaan substansif dilakukan baru setelah proses pengumuman dilakukan. Pada saat UU merek N0 19 tahun 1992 dan Nomor 14 tahun 1997 Direktorat merek tidak konssisten terhadap jangka waktu permohonan pendaftaran merek yang telah ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Terutama jangka waktu pemeriksaan substansi merek yang cenderung melebihi 9 bulan dan pengiriman sertifikat merek yang cenderung memakan waktu yang cukup lama (Insan Budi Maulana , 2002,13). Hal tersebut juga tampak pada saat proses permintaan perpanjangan pendaftaran merek , proses pendaftaran pengalihan hak atas merek , perubahan alamat atau nama pemilik meek selau memakan waktu bahkan tidak pasti waktu selesainya hal ini kan menimbulkan distorsi dan peluang bagi pihak-pihak tertaaentu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.



Dalam UU merek baru dapat dilihat bahwa proses pemeriksaan substantif langsung dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat administratif. Perubahan ini dimaksudkan agar lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut ditolak atau disetujui. Hal ini juga memberi kesempatan kepada pihak lain yang ingin mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut untuk disetujui atau ditolak.

Jangka waktu pengumuman dalam UU merek baru juga dibuat lebih singkat yaitu selama 3 bulan hal ini dimaksudkan dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman akan lebih mempersingkat jangka waktu keseluruhan proses penyelesaian permohonan tersebut. Hal tersebut tentu akan bermanfaat bagi pemohon merek dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat .

Bila dilihat dari ketentuan Undang-Undang merek yang baru in khususnya mengenai proses penyelesaian permohonan merek dimana pemeriksaan substantif dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan administratif yang diberikan maka undang-undang ini berusaha untuk lebih memberikan kemudahan dan pelayanan yang efektif dan efisien kepada pemohon. Hal tersebut juga nampak dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman yang semula 6 bulan menjadi 3 bulan . Hal ini tentu saja menguntungkan kepada pemohon yang tidak terlalu lama mengetahui apakah permohonannya diterima atau tidak.

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pendaftaran ini adalah pembentuk undang-undang tidak mencantumkan sangsi bagi pihak yang melaksanakan proses permohonan pendaftaran ini bila dalam prakteknya jangka waktu penyelesaiannya tidak sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan undang-

undang merek ini. Bagaimanapun sangsi tersebut diperlukan agar menjadi pagar dalam pelaksanaan tugas yang tepat waktu.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada pemilik merek maka Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual harus benar – benar melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangan , misalnya dalam melaksanakan pemeriksaan substantif yaitu Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual melihat bahwa merek yang dimintakan tersebut harus sesuai dengan pasal 4,5, 6 UU Merek . Maka hal tersebut benar – benar dilakukan dengan baik , karena dalam prakteknya dapat kita lihat bahwa banyak dipasaran terdapat merek untuk barang dan jasa yang sejenis yang sama dengan merek untuk barang dan jasa yang sudah terdaftar sebelumnya . Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sudah terdaftar sebelumnya dan akan menimbulkan precedent yang buruk bagi penegakan hukum merek di Indonesia.

## 2. Pengajuan dengan hak prioritas

Yang dimaksud dengan hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property .

Dalam UU Merek 2001 dalam pasal 12 mengatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut diproses setelah permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.

2. Dibuatnya pengaturan yang lebih baik mengenai indikasi geografis dan indikasi asal.

Penjelasan pasal 56 mengatakan bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau suatu identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut barang tersebut. Sedangkan indikasi asal adalah suatu tanda yang memenuhi ketentuan sebagai indikasi geografis tetapi tidak didaftarkan dan semata-mata menunjukkan asal atau suatu barang atau jasa. Yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan pada tempat, daerah atau wilayah, gambar, huruf dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Ditegaskan lebih jauh bahwa pengertian nama dan tempat yang berasal dari wilayah dalam peta geografis atau nama yang terus menerus menjadi terkenal sebagai asal barang yang bersangkutan (Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2002, 16). Perlindungan indikasi geografis tersebut meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, hasil

pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri, lainnya. Dimasukkannya perlindungan indikasi geografis dan indikasi asal tersebut merupakan konsekuensi dengan perjanjian yang kita sepakati dalam GATT yaitu Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Indikasi geografis akan mendapatkan perlindungan setelah didaftarkan atas dasar permohonan. permohonan tersebut dapat diajukan oleh pihak-pihak antara lain :

1. Lembaga yang mewakili masyarakat yang didaerahnya memproduksi barang bersangkutan .
2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.
3. Kelompok konsumen barang.

Permohonan pendaftaran tersebut dapat ditolak dengan alasan:

- a. Indikasi geografis tersebut bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas asal, sumber, proses pembuatan dan atau kegunaan.
- b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Jika permohonan tersebut ditolak dapat mengajukan banding ke komisi banding merek. Manfaat diadakannya pendaftaran indikasi geografis ini bahwa dengan adanya pendaftaran ini maka diperoleh perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri atau jenis atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan hukum bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis ini masih ada. Dengan demikian tidak ada jangka waktu

perlindungannya . Indikasi geografis tersebut akan tetap dilindungi selama kualitasnya sama dan masih terpelihara.

Indikasi asal dilindungi sebagai tanda yang memenuhi ketentuan pasal 56 ayat 1 tapi tidak didaftarkan. Perbedaan antara indikasi geografis dengan indikasi asal yaitu bahwa indikasi geografis didaftarkan tetapi untuk indikasi asal tidak demikian. Indikasi asal menunjukkan asal satu barang tau jasa

3. Adanya pengadilan Niaga yang merupakan lembaga peradilan khusus sengketa merek.

Dalam UU merek terhadap sengketa tentang merek diajukan ke pengadilan negeri . hal ini tentu saja menimbulkan proses yang berbelit-belit serta waktu yang relatif lama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan merek . Akibatnya hal tersebut akan menimbulkan keengganan untuk mengajukan sengketa merek ke pengadilan, karena sebagian besar pihak yang berkaitan dengan permasalahan merek ini adalah pihak-pihak yang merupajkan bagian dari kegiatan perekonomian.

Dengan adanya pengadilan niaga ini diharapkan sengketa merek akan dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku ekonomi yang merupakan bagian dari kegiatan dunia usaha yang membutuhkan kecepatan dan ketuntasan dalam setiap sengketa yang ada. Supaya tujuan dibentuknya pengadilan niaga ini dapat tercapai maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang baik dan bersih dalam melakukan

pekerjaan di pengadilan niaga. Dalam arti bahwa jangan sampai apa yang terjadi di pengadilan negeri selama ini terjadi juga di pengadilan niaga yang didirikan dengan tujuan supaya prosesnya dapat berjalan dengan cepat dan tuntas.

4. Dalam undang-undang ini juga diperkenalkan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Merek tahun 2001 yang mengatakan :

“Setiap penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian pertama Bab ini , para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. “.

Arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa ini merupakan salah satu alternatif yang diberikan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka diluar jalur pengadilan formal. Hal ini disebabkan karena pada umumnya atau dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum mengandung beberapa kelemahan antara lain :

1. Penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama.

Penyelesaian sengketa melalui jalur formal membutuhkan tahap-tahap tertentu dan ada tingkatan upaya-upaya hukum yang boleh dilakukan sehingga pelaksanaan putusnya tidak dapat segera dilakukan. Penyelesaian sengketa yang memakan waktu yang lama tersebut tidak cocok bagi para pelaku usaha yang menginginkan efisiensi dan keefektifan dalam bisnis mereka.

2. Biayanya mahal

Karena waktu untuk menyelesaikan sengketa tersebut banyak maka konsekwensinya Biaya yang dikeluarkan juga banyak , belum lagi dalam prakteknya biaya-biaya dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak begitu penting akan menambah ongkos berperkara di lembaga pengadilan .

4. Hakimnya belum tentu orang yang menguasai sengketa yang dihadapi.

Mealalui jalur arbitrase para pihak bisa memilih arbiternya sendiri yang dapat menguasai dan menangani sengketa mereka sehingga memuaskan para pihak yang bersengketa Hal ini tidak didapatkan ketika mereka menyelesaikan perkara mereka di lembaga formal yang ada. Didalam arbitrase para pihak dapat menyesuaikan pihak yang akan menjadi penengah dalam sengketa mereka . penentuan itu tentu saja juga didasarkan pada kemampuan arbiter terhadap sengketa yang sedang terjadi.

## **F. Hak Cipta**

Sejak tanggal 29 Juli 2002 Indonesia memiliki peraturan perundangan di bidang hak cipta yang baru yaitu Undang-Undang No 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 19 tahun 2001 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1997. Munculnya peraturan perundangan di bidang hak cipta ini juga sebagai konsekwensi keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia atau WTO

### **F.1. Pengertian Hak Cipta dan Pencipta**

Pengertian hak cipta terdapat dalam pasal 2 UU Hak Cipta yang mengatakan :

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mencegah atau meniadakan ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada orang lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dikatakan bahwa cipta timbul secara otomatis setelah dilahirkan hal ini berarti bahwa pendaftaran hak cipta tidak merupakan suatu hal yang bersifat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pencipta menurut Pasal 1 UUHC tahun 2002 adalah

Seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,



imajinasi , kecekatan , keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi .

Hal ini berarti bahwa pencipta dapat perseorangan atau beberapa orang.

## **F.2 Ciptaan Yang Dilindungi**

Obyek pengaturan hak cipta yaitu bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra termasuk program komputer. Selanjutnya Pasal 12 UUHC 2002 memberikan bidang –bidang yang boleh mendapat perlindungan hak cipta yaitu antara lain :

- a. buku, Program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya .
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan dan pantomim,
- f. senirupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, sauran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Data base merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UU no 19 tahun 2002 ini. Dalam UU sebelumnya database bukan merupakan ciptaan yang dilindungi.

Program komputer merupakan bidang yang diatur dalam UU No 19 tahun 2002 ini. Perlu diketahui bahwa pengaturan program komputer mulai diatur ddalam UU no 7 tahun 1987 kemudian juga diatur dalam UU nomor 12 tahun

1997 dan terakhir dengan UU No 19 tahun 2002. Dalam UU No 19 tahun 2002 ini terdapat perluasan pengertian program komputer.

Pengertian program komputer dalam UU No 19 tahun 2002 yaitu sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

Perubahan pengertian tentang program komputer tersebut membawa konsekuensi bahwa pengertian program komputer menjadi lebih luas dan perbuatan yang sebelum UU no 19 tahun 2002 muncul bukan merupakan suatu pelanggaran dengan adanya perluasan pengertian program komputer tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran. Misalnya mengubah source code.

### **F. 3. Pembatasan Hak Cipta**

Ada beberapa tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang tercantum dalam Pasal 13 dan 18 UU no 19 tahun 2002. Pasal 14 UU Hak Cipta antara lain berbunyi:

1. Pengumuman dan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
2. Pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 13 sampai dengan pasal 18 ini mengatakan pada intinya bahwa terdapat perbuatan yang secara prinsip hanya boleh dilakukan pencipta / pemegang hak cipta, tetapi untuk kepentingan tertentu atau bersifat komersial dapat dilakukan oleh pihak lain tanpa dipandang sebagai suatu pelanggaran.

Selanjutnya Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2002 pada pokoknya mengatakan ada beberapa tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus dicantumkan . Tindakan –tindakan tersebut tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran asal sumbernya dicantumkan secara lengkap.

Kemudian dalam Pasal 15 huruf e dan g terdapat pembatasan –pembatasan yang berkaitan dengan program komputer yang berbunyi :

- e. Perbanyak suatu ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa di perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya ;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan sendiri.

Pengaturan pasal 13 s/d 18 ini sering dikenal dengan istilah fair use. Fair use diartikan sebagai perbuatan yang secara prinsip hanya boleh dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta , tetapi untuk kepentingan tertentu/non komersial dapat dilakukan oleh pihak lain tanpa dipandang sebagai suatu pelanggaran.

Dari pasal tersebut dapat dikaji bahwa perbanyak suatu program komputer untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan tetap tidak diperbolehkan dan pemilik program komputer hanya diperbolehkan membuat salinan cadangan suatu program komputer untuk kepentingannya sendiri. Hal ini

berarti bahwa pemilik program memang diperbolehkan untuk membuat salinan cadangan atau back up untuk kepentingannya sendiri, hal ini merupakan fair use dalam program komputer yang berbeda dengan hak cipta lainnya.

#### **F.4. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta terjadi manakala siapapun selain dari pada pemilik hak melakukan perbuatan apapun terhadap sesuatu yang dilindungi oleh hak cipta kecuali ijin untuk melakukan perbuatan itu diberikan oleh si pemegang hak (Roedjiono, 2003, 3).

Bentuk bentuk pelanggaran hak cipta dan hak-hak terkait antara lain adalah perbuatan seseorang yang tanpa ijin dari pemilik dan pemegang hak yang sah melakukan reproduksi, mempertunjukkan, mentransmisikan melalui kabel, mengkopi, membuat, memperbanyak, menyiarkan, menyewakan, mengeksport atau mengimpor.

Secara khusus Bentuk perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak cipta dapat diperinci sebagai berikut :

##### **1. Melakukan perbuatan yang hanya dapat boleh dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak .**

Perbuatan yang boleh dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa pencipta atau pemegang hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya .

Hak eksklusif berarti bahwa pihak lain selain pencipta atau pemegang hak dilarang untuk mempergunakan hak cipta tersebut kecuali atas ijin dari pencipta atau pemegang hak.

Selanjutnya Pasal 49 ayat 1 dan 2 antara lain mengatakan bahwa pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan gambar pertunjukannya, sedangkan ayat 2 mengatakan hanya produser rekaman suara yang memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. Hal ini berarti bahwa bila ada pihak lain yang tanpa hak melakukan perbuatan tersebut maka dianggap melakukan pelanggaran hak cipta dan diancam dengan ketentuan pidana pasal 72 ayat 1 UUHC yang memberikan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5000.000.000 (lima ratus juta rupiah).

## **2. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual, ciptaan atau hasil pelanggaran hak cipta.**

Barang siapa melakukan perbuatan seperti tersebut diatas diancam dengan ketentuan pidana yang diatur didalam pasal 72 ayat 2 UUHC.

Pasal 72 ayat 2 UUHC antara lain berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) .

Dari bunyi pasal tersebut dapat dikaji bahwa ketentuan pidana dan denda seperti tersebut diatas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pencipta.

### **3. Memperbanyak tanpa hak penggunaan hak cipta program komputer.**

Bentuk pelanggaran ini diancam pidana yang diatur dalam pasal 72 ayat 3

UUHC yang mengatakan :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dari bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan program komputer untuk kepentingan yang bersifat komersial merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta. Hal ini berarti bahwa siapapun tidak diperbolehkan untuk menggandakan atau memperbanyak suatu program komputer tanpa ijin dari pemilik program tersebut.

### **4. Melanggar hak moral**

Setiap pencipta mempunyai hak moral atas hasil ciptaannya yang diatur dalam pasal 24 UUHC.

Hak moral tersebut yaitu hak dari pencipta untuk

- 1. Mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya.**

2. Tidak mengubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain , kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia .
3. Merubah judul dan anak judul ciptaannya, pencantuman dan perubahan nama samaran pencipta.
4. Mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepututan masyarakat.

Bila terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan hak moral tersebut maka pihak yang melakukan pelanggaran diancam dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan tersebut sesuai dengan bunyi pasal 72 ayat 6 UUHC.

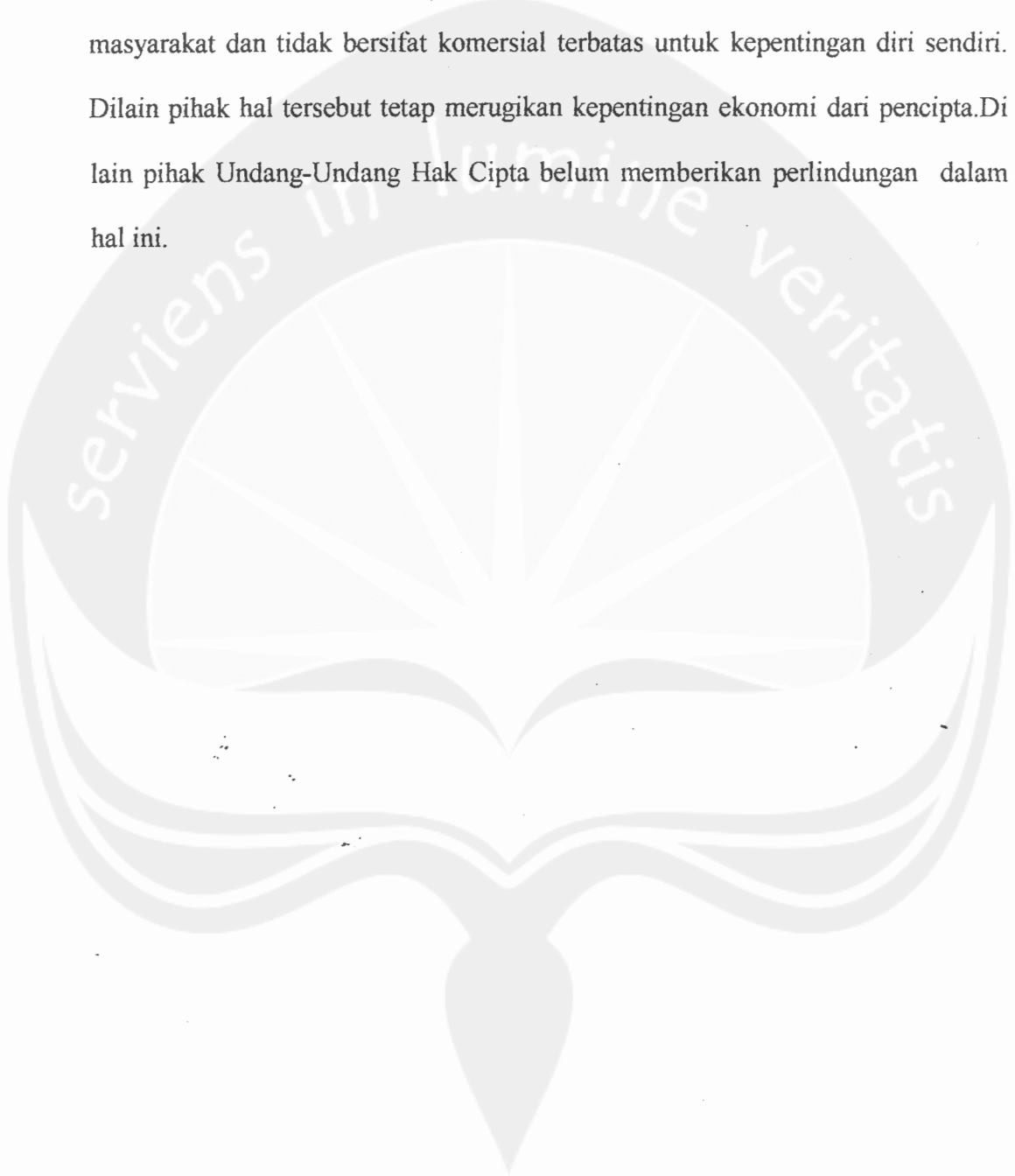
#### **5. Melanggar larangan pemerintah mengumumkan ciptaannya .**

Larangan ini terdapat dalam pasal 17 UUHC yang mengatakan bahwa :

Pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintahan di bidang agama , pertahanan , dan keamanan negara , kesusilaan , serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Bagi yang melanggar ketentuan pasal 17 tersebut maka dapat diancam pidana yang tercantum dalam pasal 72 ayat 4 UUHC. Pasal 72 ayat 4 tersebut antara lain memberikan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah)

Dari bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta tersebut diatas dapat dikaji yang merupakan bentuk pelanggaran hak cipta program komputer adalah perbanyakan program komputer yang bersifat komersial. Didalam prakteknya terdapat banyak penggunaan program komputer yang tidak asli didalam masyarakat dan tidak bersifat komersial terbatas untuk kepentingan diri sendiri. Dilain pihak hal tersebut tetap merugikan kepentingan ekonomi dari pencipta. Di lain pihak Undang-Undang Hak Cipta belum memberikan perlindungan dalam hal ini.





#### **IV. Tinjauan Yuridis Pengaturan Penggunaan Program Komputer Yang Tidak Asli Untuk Kepentingan Sendiri Didalam KUHPidana**

Seperti telah diuraikan diatas bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dalam undang – undang hak cipta adalah perbanyakan program komputer yang bersifat komersial. Didalam prakteknya terdapat banyak penggunaan program komputer yang tidak asli didalam masyarakat dan tidak bersifat komersial terbatas untuk kepentingan diri sendiri. Dilain pihak hal tersebut tetap merugikan kepentingan ekonomi dari pencipta. Telah diuraikan juga diatas bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam undang – undang hak cipta walaupun pada kenyataannya hal tersebut merugikan pihak pencipta. Oleh karena akan dicoba mengkaji ketentuan hukum yang terdapat di dalam KUH Pidana yang berkaitan dengan permasalahan tersebut .

Pasal 480 KUHPidana mengatakan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enampuluh rupiah karena penadanan.

Ke-1. barang siapa menjual, menawarkan, menukar , menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa diperoleh dari kejahatan.

Selanjutnya Pasal 481 (1) KUHPidana mengatakan ,

Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang , yang

diperoleh dari kejahatan , diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Dari pasal-pasal dalam KUHPidana yang berkaitan dengan penadahan tersebut bila dihubungkan dengan permasalahan penggunaan program komputer yang tidak asli yang tidak bersifat komersial, maka pihak yang melakukan perbuatan tersebut dimungkinkan dapat diancam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pasal-pasal penadahan tersebut diatas. Hal ini tentu saja merupakan bentuk perlindungan bagi pencipta yang merupakan pihak yang berhak mempergunakan hak ciptanya .

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan program komputer yang tidak asli bukan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta menurut undang-undang hak cipta tetapi bagi si pelanggar dapat dimungkinkan dikenai ketentuan dalam KUHPidana yang berkaitan dengan penadahan.

#### **B. Saran**

1. Memasukkan ketentuan mengenai penggunaan program komputer yang tidak asli sebagai bentuk pelanggaran hak cipta, karena bagaimanapun hal tersebut merugikan kepentingan ekonomi daari pencipta.
2. Mempergunakan program komputer yang asli sebagai bentuk penghârgaan bagi pencipta.

### **Daftar Pustaka**

Emawati Junus, Substansi Undang-undang Hak cipta (Baru) & Implementasinya, Diskusi Panel "Kebijakan Dan Implementasi Penegakan Hukum Hak Cipta Atas program Komputer" tanggal 6 September 2003 di Yogyakarta.

Ditjen Bea Cukai, Peranan Bea Dan Cukai Dalam Menangani Masalah Penyelundupan Barang Yang Terindikasi HAKI, Seminar "Penegakan Hukum Hak Atas kekayaan Intelektual" tanggal 11-12 Agustus di Yogyakarta.

Roedjiono, Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAKI, Penegakan Hukum Hak Atas kekayaan Intelektual "tanggal 11-12 Agustus di Yogyakarta.

### **Daftar Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta  
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek  
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten  
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang  
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri  
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.